

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN BERAS  
BERSUBSIDI**

**(Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan. Rumbia  
Kabupaten. Lampung Tengah)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

**OLEH**

**LINDA SUSANTI**

**1321030067**

**PROGRAM STUDI : MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/ 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN BERAS  
BERSUBSIDI**

**(Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan. Rumbia  
Kabupaten. Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

**OLEH**

**LINDA SUSANTI**

**1321030067**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H**

**PROGRAM STUDI : MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/ 2017 M**

## ABSTRAK

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Distribusi dalam islam adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Namun, dalam prakteknya program Raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang kualitasnya kurang baik dan tingkat kecurangan serta pembagian secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendistribusian raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung tengah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendistribusian raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung tengah serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian Raskin di Desa Restu Baru secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Raskin. Namun, di Desa Restu Baru aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Raskin sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Raskin, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin. Praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru adalah tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan karena tujuan pendistribusian raskin adalah untuk orang-orang miskin. Pendistribusian raskin bagi orang yang mampu adalah tidak dibenarkan. Pendistribusian raskin yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan adalah dilarang menurut hukum islam.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Linda Susanti**

NPM : **1321030067**

Jurusan : **Muamalah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI (STUDI  
KASUS DI DUSUN TIGA DESA RESTU BARU  
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Desember 2017

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP. 196010211991031003**

**Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**  
**NIP. 197111061998032005**

Mengetahui  
Ketua Prodi Muamalah

**H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. MH**  
**NIP.197208262003121002**





KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI DUSUN TIGA DESA RESTU BARU KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).** Oleh: **LINDA SUSANTI, NPM. 1321030067,** Jurusan: **MUAMALAH,** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum pada hari/tanggal : **Kamis, 07 Desember 2017**

**TIM PENGUJI**

Ketua sidang : **H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.**

Sekretaris : **Arif Fikri, M. Ag.**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Hukum

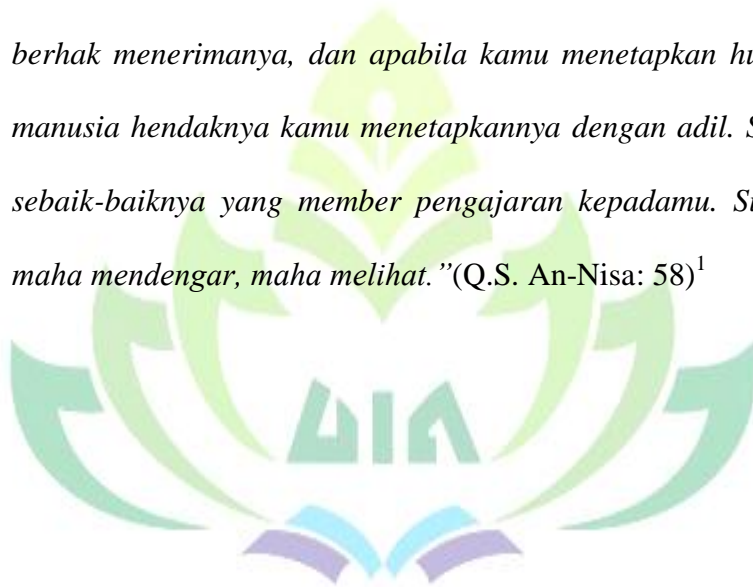
**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.*”(Q.S. An-Nisa: 58)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 69

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Ibuku tercinta, Ibu Suprihatin, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'anya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Kakakku Edi Hartono yang tiada hentinya memberikan dukungan baik materi maupun spiritual, memberikan contoh sikap teladan dan disiplin serta mengajarkan penulis akan arti hidup untuk mencapai kesuksesan dan berkat inspirasi yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus. Engkaulah sang pejuang sejati.
4. Teman-teman seperjuanganku di Muamalah dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Syariah Dan Hukum angkatan 2013.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Linda Susanti dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 25 Oktober 1994 yang merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara pasangan Ayah Sunaryo dan Ibu Suprihatin.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Desa Sumber Hadi, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2000
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 3 Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2007
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2010.
4. Pada tahun 2010 melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rumbia Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013.
5. Kemudian pada tahun 2013 meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Muamalah.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI ” (Studi Di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. H. A. Khumedi ja'far, S.Ag., M.H dan Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Irwantoni M.Hum, selaku pembimbing I dan Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku Evita Meilani, Izhartati, Elis Susanti, Endah Suryani, Asra Putri Mustika dan Ibu Anna Ernawati yang telah membantu dan memberi dukungan selama ini;
8. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2013 khususnya MU A 2013
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung , Desember 2017

Penulis,

Linda Susanti  
NPM. 1321030067

## DAFTAR ISI SKRIPSI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. KonsepJualBeliDalam Islam.....	
1. PengertianJualBeliDalamIslam .....	16
2. DasarHukumJualBeliDalam Islam.....	20
3. SyaratdanRukunJualBeliDalam Islam .....	23
4. Macam-MacamJualBeliDalam Islam.....	30
B. Prinsip-PrinsipIslam dalamPendistribusianBarang.....	
1. LaranganRiba Dan Gharar .....	34
2. KeadilanDalamDistribusi .....	38
3. Konsep Al-MaslahahDalam Islam .....	42
4. KonsepKepemilikanDalam Islam .....	46
5. LaranganMenumpukHarta .....	48
C. PendistribusianBerasBersubsidi (Raskin) .....	
1. PengertianBerasBersubsidi (Raskin).....	49
2. DasarHukumBerasBersubsidi (Raskin) .....	52
3. PengelolaanandanPengorganisasian .....	54

4. Perencanaan dan Penganggaran .....	70
5. Pengawasan Pendistribusian Beras Raskin .....	74

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Restu Baru .....	75
B. Keadaan Masyarakat Yang Mendapat Beras Bersubsidi Di Desa Restu Baru Kecamatan Runbia Kabupaten Lampung Tengah.....	79
C. Pendistribusian Beras Bersubsidi Pada Masyarakat Desa Restu Baru.....	79

### **BAB IV ANALISIS**

A. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin) Pada Masyarakat Desa Restu Baru .....	93
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin) Pada Masyarakat Desa Restu Baru.....	97

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul tinjauan hukum Islam tetang pendistribusian beras bersubsidi (studi di dusun tiga desa Restu Baru kecamatan Rumbia kabupaten Lanmpung Tengah). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-sunnah serta ijma sahabat.<sup>1</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kekonsumen dan para pemakainya.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

Beras bersubsidi atau beras miskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. atau bagi masyarakat yang berpendapatan rendah<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di rumuskan bahwa maksud judul proposal ini adalah pendistribusian beras bersubsidi atau beras miskin di dusun tiga desa Restu Baru kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari segi hukum Islam.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan objektif, karena pembagian raskin didesa restu baru kecamatan rumbia dilakukan secara merata, mendapatkan kualitas yang kurang baik serta terkadang mendapat kecurangan sedangkan seharusnya yang mendapat jatah raskin adalah orang yang berpendapatan rendah atau menengah kebawah, beras dalam keadaan baik dan tidak ada kecurangan didalamnya.
2. Alasan subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan, judul ini sesuai dengan ilmu yang peneliti pelajari dibidang Muamalah fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>2</sup> <http://www.google.co.id>, *Pengertian Beras Bersubsidi*, diakses Tanggal 20 November 2016

### C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.<sup>3</sup> Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.<sup>4</sup> Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu *faqr* yang menurut bahasa memiliki makna ihtiyaj (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan faqir. Sedangkan menurut Istilah syara', faqir bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278.

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 139.

<sup>5</sup> Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN Malang Press, 2011, hlm. 14.

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).<sup>7</sup>

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam Islam. Prinsip tersebut yakni :

1. Larangan riba dan gharar

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni; riba *al-qarud* atau sering kali disebut sebagai riba *an-nasiah*. Praktik riba *an-nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, Musykilah AL-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam, Terj., Syafri Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 22-25.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002



muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.

Jenis riba yang kedua ialah riba *al-fadl*, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli, atau disebut juga riba *al-buyu*. Riba jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba *al-buyu*, kualitas maupun kuantitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni *pertama*, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara banker dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank.<sup>8</sup>

## 2. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang tinggi dalam system sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin

---

<sup>8</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013) h.76-78

terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktinya. Disamping itu yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan kemakmuran bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan kehendak hatinya.<sup>10</sup>

### 4. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya system sosia; dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.<sup>11</sup>

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri

---

<sup>9</sup> Ibid, h.83

<sup>10</sup> Ibid, h.85

<sup>11</sup> Ibid, h.86

dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2016 (Pedum Raskin 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.<sup>12</sup>

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan

---

<sup>12</sup> Pedoman umum (pedum) raskin 2016 pada Bab 1 pendahuluan, hlm. 2

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>13</sup>

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.<sup>14</sup>

Raskin adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, Program Pembangunan yang Berkeadilan, diktum kedua.

“segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, serta pasal 34

---

<sup>13</sup> Pedum, *Op, Cit*, h. 7

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, Program Pembangunan yang Berkeadilan, diktum kedua.



yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.<sup>16</sup>

Namun, dalam prakteknya program Raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang kualitasnya kurang baik dan tingkat kecurangan serta pembagian secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat. Mekanisme pembagian Raskin di dusun tiga desa Restu Baru kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Restu Baru lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dengan kebijakan bagi rata sehingga Raskin juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang. Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Restu Baru tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuan sosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata. Masalahnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin

---

<sup>15</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34

<sup>16</sup> Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016, *Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan*, hlm. 22-23.

menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang adapun kualitas beras yang kurang bagus biasanya beras berbau atau sudah tidak layak konsumsi tetapi tetap saja diberikan kepada masyarakat serta adanya pungutan biaya yang melebihi ketentuan yang biasanya dilakukan oleh pejabat Desa. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh tentang pendistribusian Raskin di dusun tiga desa Restu Baru kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pendistribusian raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pendistribusian raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang hukum ekonomi syariah terkhusus dalam kegiatan pendistribusian raskin yang bermasalah. Sehingga diharapkan nantinya mampu mengembangkan keilmuan dibidangnya dan bahan penelitian selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak pendistribusi raskin di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam hal pelaksanaan dalam pembagian, kualitas, tingkat kecurangan agar dapat menjalankan sesuai dengan peraturan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya pendistribusian raskin terdapat beberapa yang melanggar peraturan karena membagikan raskin secara merata, kualitas beras yang kurang baik serta terdapat beberapa terdapat kecurangan pada biaya yang seharusnya diberikan kepada keluarga menengah kebawah sehingga diperlukan tinjauan hukum Islam untuk menormalkan kembali apa yang

menjadi hak seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam hal ini akan langsung mengamati kegiatan pendistribusian raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu melukiskan satu demi satu., tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari penglmsn mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang<sup>17</sup>

## **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah:

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung responden atau obyek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pedagang pendistribusi raskin.

---

<sup>17</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, h.23-24

b. Sumber data skunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan lembaga, media dan sebagainya.<sup>18</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 260 KK.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>19</sup>

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang

---

<sup>18</sup> Susiadi, *Op.Cit*, h. 95

<sup>19</sup> Susiadi, *Op.Cit*, h. 96.

terpilih dengan cermat sehingga relevan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah:

1. Penerima raskin yang pernah menerima raskin sejak tahun 2014
2. Penerima raskin yang menerima dengan jumlah timbangan yang tidak sesuai
3. Penerima raskin yang sudah berpendapatan menengah keatas

Dengan adanya kriteria-kriteria di atas dapat ditarik sampel dengan jumlah 39 KK dari 260 KK yang terdapat di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentai.

- a. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, pada masyarakat di Dusun tiga Desa Restu Baru.
- b. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h .97.



yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disediakan dengan kajian penelitian, yaitu pendistribusian raskin ditinjau dari segi hukum islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui proses, hukum islam pada pendistribusi raskin. Tujuan nya dapat dilihat dari sudut hukum islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai proses dalam pendistribusian raskin ditinjau dari segi hukum islam. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidak-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa atau lughat berarti:

الْبَيْعُ لُغَةً هُوَ مُقَا بَلَهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَا وَضَةٍ

“Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”<sup>1</sup>

Kata lain dari jual beli (*al-Bai'*) adalah al-Tijarah yang berarti perdagangan.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فَاطِر: ٢٩)...

Artinya: “Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fathir (35) : 29)<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai'(jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini

---

<sup>1</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), h.130.

<sup>2</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 437.

masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>4</sup>

Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الرَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَخَوِهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلَعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ خَوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”*<sup>5</sup>

Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.”*<sup>6</sup>

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضْعَ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً

*“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”*<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung:Alma’arif, 1997), h. 47.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 135.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>8</sup>

Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَتٍ لِرَّوْءٍ أَوْ مَكَائِدَةٍ أَحَدُهُمَا ضَمِيمٌ غَيْرُ  
رَهْبٍ وَلَا فَضْلَةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

*“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”<sup>9</sup>*

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>10</sup>

- c. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan

---

<sup>7</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.204.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 69.

<sup>9</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Op.Cit.*, h. 372.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 70.

keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>11</sup>

d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِكُهَا وَتَمْلِكُكَ

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”<sup>12</sup>

e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu’athaa (tanpa ijab qabul).<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25.

<sup>14</sup> A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h. 140.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>15</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

### a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain:

1. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>16</sup>

Artinya: “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47.



disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>17</sup>

2. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>18</sup>

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)

3. Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>19</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29)

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم) ‘an tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.31.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 83.

kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>20</sup>

## b. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

### 1. Hadis Riwayat Al-Baz-zar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)<sup>21</sup>

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

### 2. Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَ (رواه البخاري)<sup>22</sup>

Artinya: "Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah saw. bersabda: "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (H.R.Bukhari).

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

<sup>21</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

<sup>22</sup> \_\_\_\_\_, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 255.

### c. Ijma

Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>23</sup> Para ahli ushul merumuskan kadijah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَقَامَ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْعِهِ<sup>24</sup>

*“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.*

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*)

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 48.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>26</sup>

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uanganya).<sup>27</sup>

2) Shighat (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 141.

<sup>28</sup> *Ibid.*

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>29</sup>

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>30</sup>

**b. Syarat Jual Beli**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a. Baligh dan berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.

---

<sup>29</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 249.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 251.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 118-125.

Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>32</sup>

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>33</sup>

c. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 143-144.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 142.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 120.



d. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>35</sup>

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

---

<sup>35</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 143.

<sup>36</sup> Ibid, h. 148

- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: *“Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”*, lalu pembeli menjawab: *“Saya beli dengan harga sepuluh ribu.”*
  - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
  - d. Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
  - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti

memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama Fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak dinilai dalam pandangan syara'.

### 3. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah membagi jual beli yang dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual Beli yang *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*.<sup>37</sup>

2) Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanfiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 121

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 125

### 3) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, khamar.<sup>39</sup>

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>40</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk ke dalam kategori *ba'i al-garar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171

<sup>40</sup> Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 129

diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: *Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.*<sup>41</sup>

- c) Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>42</sup>
- d) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>43</sup>
- e) Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 122

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 98

<sup>43</sup> Abd Hadi, *Op.Cit.* h. 64-65



dengan sebutan uang hangus tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>44</sup>

f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Jadi jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasnya, disepakati pelanggaranannya.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.<sup>45</sup>

2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab*

---

<sup>44</sup> Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 130-131

<sup>45</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit.* h. 64

dan *qabul*.<sup>46</sup> Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

## **B. Prinsip-prinsip Islam dalam Pendistribusian Barang**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam. Prinsip tersebut yakni :

### **1. Larangan riba dan gharar**

Kata riba dalam al-Quran digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>47</sup>

Menurut etimologi, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminology riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.<sup>48</sup>

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni; riba *al-qarud* atau sering kali disebut sebagai riba *an-nasiah*. Praktik riba *an-*

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 77-78

<sup>47</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h.77

<sup>48</sup> *Ibid*, h.77

*nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.<sup>49</sup>

Jenis riba yang kedua ialah riba *al-fadl*, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli, atau disebut juga riba *al-buyu*. Riba jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba *al-buyu*, kualitas maupun kuantitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena Islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Pembahasan tentang pelarangan riba saat ini telah melingkupi berbagai aspek transaksi dalam ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi: transaksi pribadi dan transaksi domestic, pembiayaan pemerintah, dan transaksi luar negeri.<sup>50</sup>

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni *pertama*, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara banker dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk didalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya *exploitasi* sosial dalam berbagai bentuk hubungan financial yang tidak adil dan seimbang.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.77

<sup>50</sup> *Ibid*, h.78

Ketika pemilik modal (bank, pemilik modal dan lain-lain) dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, diantaranya mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana cenderung dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun tidak memiliki kemampuan financial untuk mencukupinya. Exploitasi dapat dengan mudah terjadi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan, atau bahkan kompensasi apapun atas apa yang diminta pemilik modal pada pihak yang membutuhkan, sehingga akan berdampak pada titik tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.<sup>51</sup>

Masalah kedua yang akan timbul, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Para pekerja dan pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap, dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). Pemilik modal tidak secara jelas mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan harus ditanggung secara riil. Dilihat dari pengertian lain, pemilik modal yang tidak berpartisipasi dalam proses produksi dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h.78

pengangguran terselubung karena ia tidak mendapatkan pendapatan karena orang lain dan modal atau hartanyayang bekerja.

Begitupun dengan modal *garar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Garar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, didalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.<sup>52</sup>

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung *garar* tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, *garar* secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung *garar* tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.<sup>53</sup>

## **2. Keadilan dalam distribusi**

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h.79

<sup>53</sup> *Ibid*, h.76-80

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *keadilan* merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, proposional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam alQuran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada empat makna keadilan, yakni:

Pertama, ‘*adl*’ dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam alQuran salah satunya Q.S an-Nisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*(Q.S an-Nisa (4): 58)<sup>54</sup>

Kata ‘*adl*’ di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.69.



setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

*Kedua*, kata ‘*adl*’ dalam arti ”seimbang. Yang ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan didalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “keadilan Ilahi”.<sup>55</sup>

*Ketiga*, kata ‘*adl*’ dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “member pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan didalam Q.S. al-An’am (6): 152 ,

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h.81-82

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ<sup>ط</sup>  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ<sup>ط</sup> لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” ( Q.S. al-An’am (6): 152).*<sup>56</sup>

Yang artinya “Dan apabila kamu maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu). Pengertian ‘adl seperti ini melahirkan keadaan sosial.

Kaidah Keenam Belas :

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Al-Adl (keadilan) itu wajib atas segala sesuatu dan Al-fadl (tambahan) itu sunah.

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan (kasta), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.117.

perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.<sup>57</sup>

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang, untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Upaya tersebut dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar dalam proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan dimasyarakat. Namun juga dilakukan dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrument zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi.

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h.83-84

tinggi dalam system sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktinya. Disamping itu yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.<sup>58</sup>

### 3. Konsep *al-maslahah* dalam Islam

#### 1. *Al-maslahah* sebagai Tujuan (*Syari'at maqasid al-syariah*)

*Al-Maslahah* berasal dari kata *saluha* , *yasluhu* , *salahan* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>59</sup> *Al-Maslahah* berarti segala perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *maslahah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan; atau dalam arti menghindarkan kerusakan.<sup>60</sup>

Sedangkan *maqasid al-syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah* . *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqsid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa merupakan sumber air. Air merupakan sumber utama kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air dapat diartikan dengan berjalan menuju sumber utama

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.80-83

<sup>59</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, h. 15 .

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 345.

kehidupan. Oeh karena itu, *maqasid al syari'ah* adalah maksud atau tujuan dari ditetapkan hukum-hukum syara".<sup>61</sup>

Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits mengandung kemashlahatan untuk umat manusia. Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa *maslahah* adalah tujuan hukum syara" yang berarti bahwa maslahah disamakan dengan *maqasid alsyari'ah*. Seperti pendapat 'Abd al-Malik al-Juwaini yang menggunakan istilah *maqasid* dan *maslahah* sebagai sinonim.<sup>62</sup>

Menurut Al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq, *maslahah* adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahtan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah maslahah yang menjadi tujuan syara".<sup>63</sup>

Setiap hukum yang disyarIatkan oleh Allah baik berupa Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah yang mempunyai maksud atau tujuan yaitu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, dibebankannya syariat kepada manusia adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia itu sendiri.

---

<sup>61</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta : ArRuzz Media, 2011, h. 154.

<sup>62</sup> Jaser „Audah, Al-Maqasid, diterjemahkan oleh Ali „Abdelmon"im dalam : *“Al-Maqasid Untuk Pemula”*, Yogyakarta : SUKA Press, 2013, h. 6.

<sup>63</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi: *Aspek teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 81.

2. Kriteria *Al-Maslahah* Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
- Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al- syari'ah*.
  - Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara,,. menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.
  - Kemaslahatan itu termasuk dalam *maslahah daruriyah* dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya kemaslahatan pribadi saja.<sup>64</sup>
3. Bentuk *Al-Mashlahah* memiliki dua bentuk :
- Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. Manfaat itu ada yang langsung bisa dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh. Ada juga yang manfaatnya baru bisa dirasakan kemudian hari, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut yang dirasakan justru ketidaknakan.
  - Menghindarkan manusia dari kerusakan atau keburukan. Sama halnya dengan manfaat, kerusakan juga terkadang ada yang bisa dirasakan langsung dan ada pula yang baru bisa dirasakan pada kemudian hari.<sup>65</sup> Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh yang berlaku untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam arti mewujudkan manfaat maupun

---

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 123.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 222.



menghindari kerusakan, yaitu : ”Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.” Atau kaidah yang berbunyi :  
“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

#### 4. Macam-macam *Al-Maslahah*

a. Berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam,<sup>66</sup> yaitu:

- 1) *Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang sangat penting dan pokok bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila masalah ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan berkembang bahkan bisa punah. *Maslahah daruriyah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Maslahah hajjiyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup bahagia dan sejahtera. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Adanya hukum tentang rukhsah (keringanan) dalam masalah ibadah merupakan contoh kepedulian hukum Islam terhadap masalah ini.<sup>67</sup>
- 3) *Maslahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih indah dan sempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia

---

<sup>66</sup>Ibid, h. 348-349.

<sup>67</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2009, h. 235.

menjadi kurang sempurna, namun tidak sampai mengalami kesulitan maupun kepunahan.

b. Berdasarkan adanya keserasian antara akal dengan tujuan syara<sup>68</sup> dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam,<sup>68</sup> yaitu:

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui dan diperhitungkan oleh dalil-dalil syara<sup>68</sup>, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) *Maslahah mulgah* adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal tetapi ada dalil syara<sup>68</sup> yang menolaknya.
- 3) *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak ada dalil syara<sup>68</sup> yang mengakuinya ataupun menolaknya, misalnya percetakan mata uang.<sup>69</sup>

#### 4. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan kemakmuran bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan kehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, h.351-353.

<sup>69</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam *"Ilmu Ushul Fiqh"*, Semarang : Dina Utama, 1994, h. 116.

kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat (51):19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”* (Q.S.Az-Zariat (51):19)<sup>70</sup>

Adapun Hadis Riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَالِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah)*

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah ditengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.416.

milik Allah dan manusia memegangnya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas harta benda tersebut.

Ketika kesadaran tersebut telah tumbuh, maka secara langsung akan membentuk pribadi yang tidak hanya berpikir menciptakan kesejahteraan individual, namun juga bertanggung jawab pada terciptanya kesejahteraan pada lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan tugas bagi seorang khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.<sup>71</sup>

## **5. Larangan Menumpuk Harta**

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Disamping itu penumpukan harta berlebihan dapat

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.85-86

melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi masyarakat.<sup>72</sup>

Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karna sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>73</sup>

## C. Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin)

### 1. Pengertian Beras Bersubsidi

Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h.86

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.31.

ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2016 (Pedum Raskin 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program Raskin secara nasional.<sup>74</sup>

a. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

1) Tujuan

Tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

---

<sup>74</sup> Pedoman umum (pedum) raskin 2016 *pada Bab 1 pendahuluan*, h. 2



## 2) Sasaran

Sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

### b. Manfaat

Manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h 14

## 2. Dasar Hukum Beras Bersubsidi

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah:<sup>76</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

---

<sup>76</sup> Ibid, h. 1-3

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

- f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- h. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

### **3. Pengelolaan dan Pengorganisasian**

Dalam rangka pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat

Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat.

1. tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi.

## 2. fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- b. Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- c. Penyusunan pedoman umum penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di provinsi dan kabupaten/kota.

3. Struktur dan keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Tahun 2015, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat terdiri dari pengarah, pelaksana dan sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan anggota terdiri dari unsur kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian dalam negeri, kementerian pertanian, kementerian keuangan, kementerian sosial, kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat TNP2K dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: ketua, wakil ketua dan anggota. ketua pelaksana adalah deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; wakil ketua bidang kebijakan perencanaan adalah direktur perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional wakil ketua II/bidang

kebijakan anggaran adalah direktur anggaran III, ditjen anggaran kementerian keuangan;

Wakil ketua III/bidang pelaksanaan dan distribusi adalah direktur operasional dan pelayanan publik perum BULOG; wakil ketua IV/bidang fasilitasi, pemantauan, avaluasi, dan pengaduan adalah direktur sinkronisasi urusan pemerintahan daerah I ditjen bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri.

Anggota tim terdiri dari unsur-unsur kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian sosial, kementerian pertanian, BPS, dan perum BULOG.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) anggota tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat adalah sebagai berikut:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian



kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

- b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- c) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) bertanggung jawab dibidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- d) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran subsidi pangan dan penyelesaian dokumen anggaran subsidi pangan.
- e) Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada perum BULOG, pendampingan melalui TKSK, serta pemantauan dan evaluasi.

- f) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, pembinaan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi dan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota.
- g) Kementerian Pertanian (Kementan) bertanggung jawab melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras dalam negeri untuk pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Bersama perum BULOG menjaga stok beras untuk kebutuhan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui pembinaan terhadap petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas beras dalam negeri.
- h) Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggungjawab menyediakan informasi data kemiskinan makro bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus dan/atau survei yang dilakukan sendiri dan didukung data sekunder dari kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
- i) Sekretariat TNP2K bertanggung jawab untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program, melakukan pemantauan

dan evaluasi serta analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis.

- j) Perum BULOG bertanggung jawab dalam penyediaan, dan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari gudang perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi (TD).

b. Tim Koordinasi Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi adalah pelaksana program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani

pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat.

### 3. fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di provinsi.
- b. Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota.
- f. Penanganan Pengaduan di provinsi.

- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota.
  - h. Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditujukan kepada menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menteri koordinator bidang perekonomian, menteri sosial, menteri dalam negeri dan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat.
4. Struktur tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi
- Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi.
5. Keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi
- tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di provinsi antara lain: sekretariat provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, dinas sosial, serta beberapa

instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

- c. Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota adalah pelaksana program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Penyalur

an Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota.
- b. Penetapan pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kabupaten/kota.
- e. Sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayah kabupaten/kota.
- f. Perencanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.



- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
  - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - i. Penanganan pengaduan.
  - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan dan pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - k. Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah provinsi.
4. Struktur tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota
- Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
5. Keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di kabupaten/kota antara lain: Sekretaris kabupaten/kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/ sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diwilayahnya dan membentuk tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan adalah pelaksana program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemonitoran dan evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota.

Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan.
  - b. Sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayah kecamatan.
  - c. Pendistribusian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
  - d. Penyelesaian HTR dan administrasi.

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - f. Pembinaan terhadap pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
  - g. Pelaporan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/ke lurahan dan pelaporan realisasi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada RTS-PM.
4. Struktur dan keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan terdiri dari

unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain sekretariat kecamatan, seksi kesejahteraan sosial, dan kepala seksi PMD atau kepala seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

- e. Pelaksanaan distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.

Kepala desa/lurah/kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya, dan membentuk pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

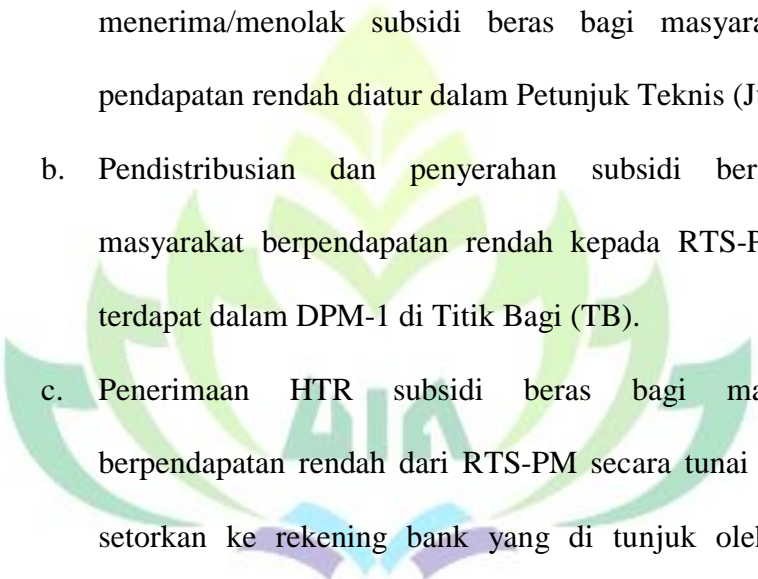
Pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- 
- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
  - b. Pendistribusian dan penyerahan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
  - c. Penerimaan HTR subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari RTS-PM secara tunai untuk di setorkan ke rekening bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
  - d. Penyelesaian administrasi penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
  - e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota

melalui tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan.<sup>77</sup>

#### **4. Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

##### **a. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

##### **1. Kebijakan penetapan RTS-PM**

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Ber

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 15-23



pendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.

- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati/Wali kota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

## 2. Penetapan titik distribusi (td)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

## 3. Penetapan titik Bagi (tB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTSPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

b. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang No mor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka

---

<sup>78</sup>Ibid, h. 24-26

pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyelesaian anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat

4. Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

## **5. Pengawasan pendistribusian beras bersubsidi**

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> *Ibid*, h 39

### **BAB III**

#### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Restu Baru**

###### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Restu Baru**

Kampung Restu Baru berdiri atau dibuka pada tahun 1963 oleh jawatan transmigrasi kampung Restu Baru. Berasal dari Transmigrasi Gunung Agung Bali sebanyak 200KK, yang urus oleh jawatan Transmigrasi, setelah itu barulah dibentuk pengurus Desa/Kampung. Sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1969 masuk wilayah perwakilan Kecamatan dan menjadi Desa/Kampung wilayah Kecamatan Raman Utara. Sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang perkembangan penduduk Desa/Kampung sedemikian pesat dari berbagai macam suku yang semua ini menjadi sumber pemberdayaan Desa.

Sejak berdirinya Desa/Kampung Restu Baru sampai sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa/Kampung:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Tabulasi Data Potensi Kampung Restu Baru 2014, Kecamatan Restu Baru Kabupaten Lampung Tengah*, h. 1

## 2. Letak Geografis Desa Restu Baru

### 1) Batas Wilayah Desa

- Sebelah utara : Desa Bina Karya II
- Sebelah Timur : Desa Restu Buana
- Sebelah Selatan : Desa Rukti Basuki
- Sebelah Barat : Desa Reno Basuki

### 2) Jarak Geografis

**Tabel 1.1**  
**Jarak Geografis**

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Ke Gunung	- Km
2.	Ke Laut	60 Km
3.	Ke Sungai	2 Km
4.	Ke Pinggiran Hutan	15 Km
5	Ke Pasar	1 Km
6	Ke Pelabuhan	170 Km
7	Ke Bandara	80 Km
8	Ke Terminal	80 Km
9	Ke Tempat Wisata	6 Km
10	Ke Kantor Polisi Militer	1 Km
11	Ke Perbatasan Kabupaten	20 Km
12	Ke Perbatasan Provinsi	800 Km
13	Ke Stasiun	114 Km

Jarak geografis Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid, h. 9

### 3. Data Penduduk

#### a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	INDIKATOR	Jumlah	
		Tahun 2013	Tahun 2014
1	0 – 12 bulan	76 orang	81 orang
2	>1 - < 5 tahun	242 orang	254 orang
3	$\geq 5$ - < 7 tahun	154 orang	153 orang
4	$\geq 7$ - $\leq 15$ tahun	987 orang	990 orang
5	>15 – 56 tahun	2176 orang	2178 orang
6	>56 tahun	255 orang	285 orang

Jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbi Kabupaten Lampung Tengah<sup>3</sup>

#### b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

NO	INDIKATOR	Jumlah	
		Tahun 2013	Tahun 2014
1	Jumlah Penduduk	3898 orang	3889 orang
2	Jumlah Laki-Laki	1982 orang	1982 orang
3	Jumlah Perempuan	1916 orang	1907 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1025 orang	1027 orang

Jumlah penduduk berdasarkan gender di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 10

<sup>4</sup> Ibid, h. 11



c) **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
2.	SD	50 Orang
3.	SMP	49 Orang
4.	SMA	35 Orang
5.	D-3	2 Orang
6.	S-1	5 Orang
7.	S-2	2 Orang

Tingkat Pendidikan di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupatn Lmpung Tengah.<sup>5</sup>

d) **Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	451 Orang	560 Orang	551 Orang
2.	Hindu	10 Orang	9 Orang	19 Orang
3.	Kristen	9 Orang	6 Orang	15 Orang
4.	Khatolik	17 Orang	23 Orang	40 Orang

Agama di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.<sup>6</sup>

e) **Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	400 Orang
2.	Buruh	178 Orang
3.	Tani	1017 Orang
4.	TNI/Polri	5 Orang
5.	Swasta	224 Orang
6.	Guru	68 Orang
7.	Pedagang	205 Orang

Pekerjaan di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid,h.14

<sup>6</sup> Ibid, h. 13

<sup>7</sup> Ibid, h. 13

## **B. Keadaan Masyarakat Yang Mendapat Beras Bersubsidi Di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah**

Masyarakat Dusun tiga Desa Restu Baru merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh bengkel dan kuli bangunan. Desa Restu Baru terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu pendapatan perkapita rata-rata Rp.1.000.000/bulan. Pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya harga beras pada awal tahun 2016 di Desa Restu Baru Rp.8500/kg namun pada akhir tahun 2016 ini harga beras mencapai Rp.10500/kg. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program raskin setiap bulannya.

Masyarakat Dusun tiga Desa Restu Baru merasa terbantu dengan adanya program raskin tetapi dalam pendistribusiannya terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri menerima begitu saja raskin yang dibagikan. Mereka tidak mengetahui berapa Kg raskin yang seharusnya mereka terima menurut aturan pemerintah sehingga raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru dibagi secara merata tanpa memperdulikan status sosial masyarakat.

## **C. Pendistribusian Beras Bersubsidi Pada Masyarakat Desa Restu Baru**

Wawancara dari bapak Sud yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 3 anggota keluarga, mempunyai 1 anak yang sudah memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Sud dari bertani dalam 1 bulan

kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. sistem pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>8</sup>

Wawancara dari bapak Muklis yang bekerja sebagai guru yang mempunyai 4 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang masih bersekolah. Pendapatan yang diperoleh bapak Muklis dan sang istri dari mengajar dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak

---

<sup>8</sup> Bapak Sud, warga Desa Restu Baru, wawancara, 20 oktober 2017

mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>9</sup>

Wawancara dari bapak Sukanan yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 4 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Sukanan dari bertani dan istri yang bekerja sebagai penjual ayam potong dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>10</sup>

Wawancara dari bapak Sugito yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 5 anggota keluarga, mempunyai 1 anak yang sudah memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Sugito dari bertani dan anaknya yang sudah bekerja dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang

---

<sup>9</sup> Bapak Muklis, warga Desa Restu Baru, wawancara, 20 oktober 2017,

<sup>10</sup> Bapak Sukanan, warga Desa Restu Baru, wawancara, 20 oktober 2017

beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>11</sup>

Wawancara dari bapak Basuki yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 4 anggota keluarga, mempunyai 2 anak yang belum memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Basuki dari bertani 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.

Wawancara dari bapak Mujiman yang bekerja sebagai Mandor bangunan yang mempunyai 6 anggota keluarga, mempunyai 1 anak yang sudah memiliki pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh bapak Mujiman dan

---

<sup>11</sup> Bapak Sugito, warga Desa Restu Baru, wawancara, 20 oktober 2017

aanaknya yang sudah bekerja dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah lagi dengan adanya program raskin yang dibagikan secara merata di desa. Walaupun tidak terlalu banyak raskin yang beliau dapatkan sebanyak 5kg perbulannya dengan biaya sebesar Rp10.000. system pembayarannya dilakukan diawal baru setelah kurang lebih satu minggu masyarakat mendapatkan raskin. Kualitas raskin yang diterima juga tidak menentu atau terkadang layak dan terkadang kurang layak. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dari bapak Midi yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 4 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Midi dari bertani dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi dengan adanya tanggungan 2 orang anak yang masih bersekolah. Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya

---

<sup>12</sup> Bapak Mujiman, warga Desa Restu Baru, wawancara, 20 oktober 2017

dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dari bapak Teguh yang bekerja sebagai petani palawija yang mempunyai 6 anggota keluarga, dengan 2 anak yang masih bersekolah dan 1 anak yang masih menganggur serta 1 nenek. Pendapatan yang diperoleh bapak Teguh dari bertani dan sang istri yang berdagang dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Hasil wawancara dari bapak Woro yang bekerja sebagai buruh yang mempunyai 4 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Woro dan sang istri dari bekerja sebagai buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan

---

<sup>13</sup> Bapak Midi, warga Desa Restu Baru, *wawancara*, 21 oktober 2017

<sup>14</sup> Bapak Teguh, warga Desa Restu, *wawancara*, 21 oktober 2017



bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dari bapak Rianto yang bekerja sebagai buruh yang mempunyai 3 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Rianto dari bekerja sebagai buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 900.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Woro, warga Desa Restu Baru, wawancara, 21 oktober 2017

<sup>16</sup> Bapak Rianto, warga Desa Restu Baru, wawancara, 21 oktober 2017

Hasil wawancara dari bapak Supriono yang bekerja sebagai buruh karet yang mempunyai 4 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Supriono dari bekerja sebagai buruh karet dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dari bapak Sisu yang bekerja sebagai petani karet yang mempunyai 5 anggota keluarga. Pendapatan yang diperoleh bapak Sisu dari bekerja sebagai petani karet dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi

---

<sup>17</sup> Bapak Supriono, warga Desa Restu Baru, wawancara, 21 oktober 2017

kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Hasil wawancara dari bapak Eko yang bekerja sebagai kuli karet yang mempunyai 3 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Eko dari bekerja sebagai kuli karet dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Hasil wawancara dari bapak Ari yang bekerja sebagai petani yang mempunyai 5 anggota keluarga, Pendapatan yang diperoleh bapak Aridari bekerja sebagai petani dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000. Beliau mengatakan dengan pendapatan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dengan keadaan yang seperti itu beliau mendapatkan bantuan

---

<sup>18</sup> Bapak Sisu, warga Desa Restu Baru, wawancara, 22 oktober 2017

<sup>19</sup> Bapak Eko, warga Desa Restu Baru, wawancara, 22 oktober 2017

raskin sebanyak 5 Kg setiap bulannya dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000, kualitas beras yang beliau dapatkan juga tidak menentu (kadang bagus kadang juga tidak), walaupun menurut beliau jumlah beras yang didapatkan hanya 5 kg tetapi bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian raskin serta biaya yang seharusnya dibayarkan, beliau hanya mengetahui aturan yang ditetapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan ketua RT mengenai jumlah beras yang mereka terima serta jumlah uang yang harus dibayarkan tanpa bertanya kualitas beras. Apabila ketua RT menyuruh mereka mengambil beras 5 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 5 kg dan apabila ketua RT meminta membayar 10.000,- maka masyarakat juga akan membayar 10.000,- begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan ketua RT tersebut.

Proses pendistribusian Raskin di Dusun tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah: *pertama*, ketua RT berkeliling Desa untuk meminta uang kepada masyarakat untuk menebus Raskin. *Kedua*, kurang lebih satu minggu Raskin sudah berada di rumah ketua RT dan masyarakat diminta untuk mengambil Raskin di rumah beliau. *Ketiga*, masyarakat berdatangan ke kediaman ketua RT guna mengambil beras yang

---

<sup>20</sup> Bapak Ari, warga Desa Restu Baru, wawancara, 22 oktober 2017

sudah meraka bayar. Biasanya setiap KK mendapat kurang lebih 5 Kg atau 1 karung beras berisi 10 Kg dibagi kepada 2 KK.

Dengan demikian dalam praktek distribusi Raskin secara merata di Dusun tiga Desa Rumbia tidak terdapat unsur kerelaan antar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan ketua RT tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima dari masyarakat miskin tentang jumlah Raskin yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya terdapat unsur keterpaksaan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **A. Proses Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin) Pada Masyarakat Dusun Tiga Desa Restu Baru**

Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Restu Baru dilakukan dengan sistem bagi rata dimana Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 260 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Restu Baru. Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 15 Kg berkurang menjadi rata-rata 5 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Restu Baru.

Pembagian Raskin dengan sistem bagi rata menyebabkan Raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan Raskin didistribusikan secara merata, menjadikan beras yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin, baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Raskin. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima Raskin sebesar 15Kg/bulan. Namun, dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 5 Kg.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru, antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi



program Raskin dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga Raskin.

Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi program Raskin kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Restu Baru yang membahas tentang masalah Raskin, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah ketua RT antara kepala desa, satgas Raskin, dan ketua tiap-tiap RT. Serta pembinaan bagi satgas Raskin untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor kecamatan.

Sosialisasi tentang Raskin tersebut ternyata tidak dilanjutkan kepada masyarakat Desa Restu Baru. Sosialisasi yang kurang juga menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Raskin pun juga kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Raskin.

Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima Raskin, banyaknya beras yang diterima, dan banyaknya uang yang harus dibayar untuk menebus beras tersebut. Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa Raskin

merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

2. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sangat sulit menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan mungkin tidak ada.

Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Restu Baru yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (Mandi Cuci Kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Raskin.

3. Budaya Kebersamaan Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Restu Baru umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Raskin. Masyarakat Desa Restu Baru berpendapat bahwa Raskin sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga

budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Raskin meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 5Kg/keluarga, daripada mendapatkan Raskin dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.

4. Tradisi Pembagian Raskin dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di desa Restu Baru dan seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu Raskin hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin) Pada Masyarakat Dusun Tiga Desa Restu Baru**

Dalam praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras. Raskin adalah suatu barang yang akan berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang miskin.

Dalam kaitannya dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap Raskin disebabkan oleh adanya akad yaitu akad jual-beli. Raskin merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran.

Raskin memang dikatakan sebagai beras masyarakat miskin, namun Raskin tidak didapat mereka dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk menguasai Raskin baru timbul setelah dilakukannya akad jual-beli, dimana telah ditentukan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang boleh membelinya.

Dalam praktek pembagian Raskin ini. Apabila Raskin telah ditebus maka beras tersebut akan berada pada kekuasaan orang yang menebusnya sehingga ia dapat menggunakan beras tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara’.

Praktek pembagian Raskin di Dusun Tiga Desa Restu Baru dengan sistem bagi rata telah terjadi ketidakadilan yang merugikan kepentingan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyanya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”(Q.S. An-Nisa: 58)

Secara lahiriah, masyarakat Desa Restu Baru menerima Raskin dengan cara yang sah dan tidak merugikan orang lain karena mereka mendapatkan Raskin menggunakan akad jual-beli. Namun, apabila dilihat dari esensi program Raskin tersebut yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah, maka dapat diketahui bahwa beras Raskin milik masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima Raskin sama artinya mereka telah mendapatkan ketidakadilan.

Raskin di Desa Rumbia yang dibagikan secara merata kepada semua masyarakat telah menyebabkan berkurangnya jatah beras yang diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin). Hal ini jelas merugikan masyarakat yang berhak menerima Raskin karena kebutuhan akan berasnya menjadi tidak terpenuhi secara semestinya. Dengan demikian, praktek pendistribusian Raskin secara merata telah menghilangkan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima Raskin secara utuh.

Dengan dibagikannya Raskin secara merata kepada semua rumah tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin sebesar 15 Kg menjadi berkurang yang berarti jumlah yang diterimanya juga berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa

mekanisme distribusi Raskin seperti yang terjadi di Desa Restu Baru tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

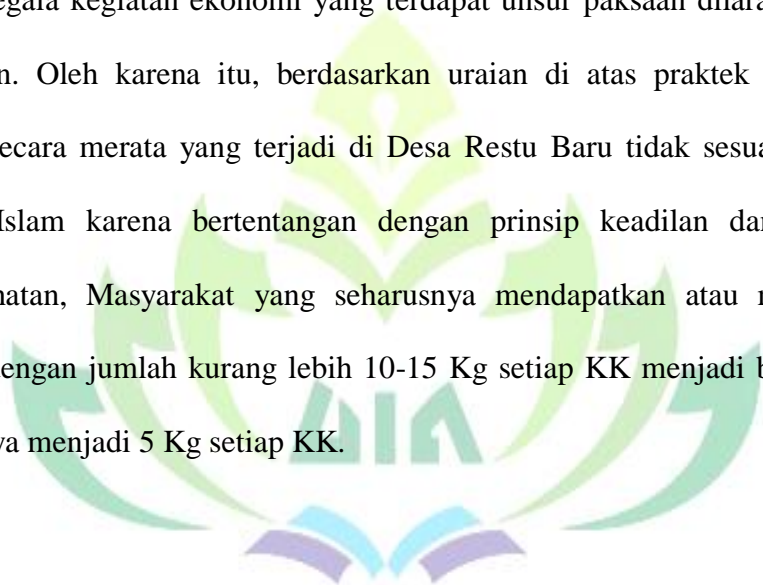
Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Desa Restu Baru tidak mengetahui dengan detail tentang Raskin, baik jumlah, harga, maupun sasarannya menurut Pedum, Juklak, dan Juknis Raskin. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat miskin menerima begitu saja Raskin yang dibagikan meskipun sebenarnya jumlah beras tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga miskin, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan ketua RT mengenai jumlah beras yang mereka terima. Apabila ketua RT menyuruh mereka mengambil beras 5 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 5 kg begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan ketua RT tersebut.

Dengan demikian dalam praktek distribusi Raskin secara merata di Desa Restu Baru tidak terdapat unsur kerelaan diantar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan ketua RT mengenai haknya tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas

ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima dari masyarakat miskin tentang jumlah Raskin yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya terdapat unsur keterpaksaan.

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah prinsip kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas praktek distribusi Raskin secara merata yang terjadi di Desa Restu Baru tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan, Masyarakat yang seharusnya mendapatkan atau menerima Raskin dengan jumlah kurang lebih 10-15 Kg setiap KK menjadi berkurang jumlahnya menjadi 5 Kg setiap KK.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis praktek distribusi bagi rata Raskin yang terjadi di Desa Rumbia dengan berpedoman pada hukum Islam, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pendistribusian Raskin di Desa Restu Baru secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Raskin. Namun, di Desa Restu Baru aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Raskin sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Raskin, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin.
2. Bahwa praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru adalah dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam. Alasannya dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu: dari aspek ketidakadilan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang menerima bantuan Raskin dari pemerintah sehingga dengan pembagian Raskin secara merata akan mengambil atau mengurangi jumlah Raskin yang didapatkan masyarakat miskin; dari aspek distribusi bahwa distribusi Raskin tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan disebabkan Raskin tidak

diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, pembagian Raskin secara merata tersebut tidak sesuai karena dengan pembagian yang demikian justru akan membuat masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhannya akan beras dan hal tersebut tentu saja merugikan mereka.

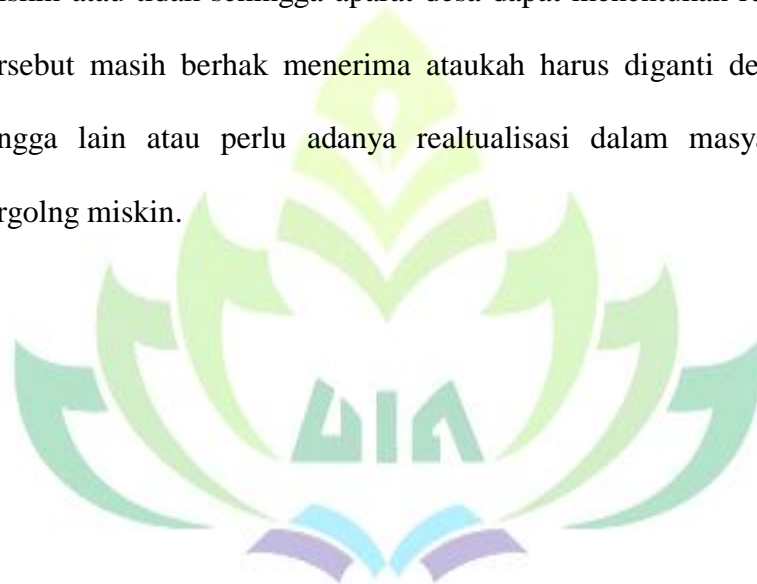
## **B. Saran-saran**

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi aparat desa, satgas Raskin, dan masyarakat Desa Restu Baru adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya semua masyarakat Desa Restu Baru dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program Raskin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan informasi tentang Raskin yang kurang tepat.
2. Hendaknya aparat desa bersikap obyektif dalam membagikan Raskin yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Apabila yang menerima Raskin memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.
3. Apabila jumlah alokasi Raskin dirasa sangat tidak seimbang dengan jumlah masyarakat miskin di Desa Restu Baru, hendaknya aparat desa, satgas Raskin, dan ketua masing-masing RT melakukan koordinasi dengan baik. Lalu hendaknya para aparat desa tersebut melakukan pemutahiran data masyarakat miskin dan kemudian melaporkannya

kepada Tim Koordinasi Raskin di tingkat kecamatan yang memungkinkan penambahan jumlah alokasi Raskin untuk Desa Restu Baru.

4. Hendaknya aparat desa meminta daftar nama-nama Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdaftar secara resmi sebagai penerima Raskin agar dapat diketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak sehingga aparat desa dapat menentukan rumah tangga tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga lain atau perlu adanya reaktualisasi dalam masyarakat yang tergolong miskin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairy Abdurrahman, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990)
- Abdillah Muhammad Abi bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Audah, Al-Maqasid Jaser ,, diterjemahkan oleh Ali „Abdelmon“im dalam : “*Al-Maqasid Untuk Pemula*”, Yogyakarta : SUKA Press, 2013,
- Ahmad Saebani Beni, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Abdullah Muhammad Imam Syafi'i Abu bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Amin Suma Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013)
- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002
- Farih Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008,
- Ghofur Noor Ruslan Abdul, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013)
- Hajar Al Asqalani Al Hafidh Ibnu, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Haq, Al-Syathibi Hamka: *Aspek teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007
- <http://www.google.co.id>, *Pengertian Beras Bersubsidi*, diakses Tanggal (20 November 2016)

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

K. Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset

Khumedi Ja'far Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Muhammad ar-Ramli Syamsudin, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)

Pedoman umum (pedum) raskin 2016 *pada Bab 1 pendahuluan*,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, Program Pembangunan yang Berkeadilan, diktum kedua.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34

Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III

Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Qardhawi Yusuf, Musykilah AL-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam, Terj., *Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008,

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung:Alma'arif, 1997)

*Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya)

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015)

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid XII* (Bandung: Al-Ma’arif, 1990)

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta : ArRuzz Media, 2011,

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2009

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014)

*Tabulasi Data Potensi Kampung Restu Baru 2014, Kecamatan Restu Baru Kabupaten Lampung Tengah ,*

Wahhab Khallaf Abdul, *Al-Ilm Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Semarang : Dina Utama, 1994,

Wargadinata Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN Malang Press, 2011

